

## **BAB II**

### **Perekonomian Negara Jepang**

Jepang merupakan negara yang dikenal dengan perekonomian yang maju walaupun dengan keterbatasan sumber daya alam. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Jepang, namun negara ini dapat membuktikan keberhasilannya dalam hal perekonomian. Sehingga Negara Jepang mampu bersaing dengan negara lain di dunia Internasional dalam sektor perekonomian. Perekonomian di Negara Jepang tentunya tidak lepas dari bidang perindustriannya, yang mana industri di Negara Jepang sangat mendominasi sektor perekonomian di negara tersebut.

Industri di Negara Jepang tentunya tidak begitu saja mengalami peningkatan kinerja secara tiba-tiba. Industri di Negara Jepang juga mengalami pasang surut dalam membantu perekonomian di Negara Jepang mengingat pada saat itu Negara Amerika Serikat masih mendominasi Negara Jepang dengan berbagai kebijakannya. Namun, Pemerintah Jepang selalu berhasil membuat trobosan untuk menyelamatkan keadaan negaranya agar tidak semakin *chaos*. Banyak cara yang dilakukan oleh Negara Jepang untuk menjadi negara yang lebih mandiri dan negara yang dicap maju tanpa bantuan yang diberikan oleh Negara Amerika Serikat. Tentunya banyak sekali hal yang harus Negara Jepang hadapi sebelum mencapai ekonomi yang lebih mandiri seperti sekarang ini.

## A. Kondisi Ekonomi Jepang

Perang dunia kedua berlangsung sejak September tahun 1939 hingga September tahun 1945 yang melibatkan dua kubu besar yaitu kelompok sekutu yang diantaranya ada Negara Amerika, Inggris, Perancis dan negara lainnya, kelompok sentral yaitu Negara Jepang, Jerman, dan Itali. Perang dunia kedua merupakan peristiwa perang terbesar sepanjang sejarah. Peristiwa tersebut dianggap peristiwa bersejarah terbesar karena banyaknya pihak yang ikut serta dalam perang tersebut.

Penyebab umum dari adanya perang dunia kedua sendiri diantaranya kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menciptakan perdamaian dunia, selain itu adanya persaingan antar negara maju dalam hal militer dan persenjataan, dan juga adanya aliansi politik.<sup>1</sup> Sedangkan sebab khusus dalam perang dunia kedua yaitu di Kawasan Eropa, berupa serangan kilat (*blitzkrieg*) yang dilakukan Negara Jerman atas Negara Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan atas penyerangan tersebut adalah untuk merebut kembali kota Danzig (penduduknya Bangsa Jerman) dimana dalam waktu singkat sebagian besar Negara Polandia dikuasai Negara Jerman dan juga di Kawasan Asia Pasifik, ditandai dengan adanya penyerbuan Negara Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut di Negara Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941.<sup>2</sup> Beberapa penyebab di atas tidak lepas dari latar belakang rasa balas dendam antar negara yang kalah dalam perang dunia pertama. Negara-negara yang kalah dalam perang

---

<sup>1</sup> Dosen Pendidikan, "Sejarah, Latar Belakang dan Penyebab Terjadinya Perang Dunia II", <http://www.dosenpendidikan.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 WIB

<sup>2</sup> Pelajaran Sekolah, "Sejarah dan Latar Belakang Terjadinya Perang Dunia II", <http://www.pelajaransekolah.net>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.15 WIB

dunia pertama menganggap belum tuntas dan ingin membalas dan menunjukkan kekuatan negaranya dalam perang dunia kedua.

Pada perang dunia kedua, Negara Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Negara Amerika yaitu *Pearl Harbour* pada tanggal 7 Desember tahun 1941 yang kemudian membawa Negara Amerika Serikat pada perang dunia kedua. *Pearl Harbour* sendiri merupakan pangkalan Angkatan Laut di Negara Amerika Serikat yang berada di Pulau Oahu, Hawaii, Barat Honolulu. Penyerangan itu membuat Negara Amerika Serikat ingin melakukan penyerangan balasan karena mengalami kerugian ekonomi dan kehilangan banyak korban jiwa.

Penyerangan Negara Jepang dilakukan pada pagi hari saat pasukan Amerika Serikat sedang tidak siaga untuk berperang. Oleh karena itu, Negara Amerika membalas kejadian tersebut dengan menjatuhkan bom atom ke Negara Jepang di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 di mana kehancuran kedua kota tersebut membuat Negara Jepang menyerah tanpa syarat dalam perang dunia kedua. Kaisar Hirohito menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya Kaisar Hirohito menjadi tanda berakhirnya Perang Pasifik dan runtuhnya sistem monarki di Negara Jepang. Negara Jepang mengalami kekalahan yang sangat besar akibat dijatuhkannya bom atom tersebut.

Kekalahan membuat masyarakat di Negara Jepang mengalami perubahan sikap yang dirasakan oleh masyarakatnya. Masyarakat di Negara Jepang terkenal dengan masyarakat yang selalu optimis dan memiliki kepercayaan yang tinggi dalam kondisi apapun. Tetapi, setelah *pasca* perang dunia kedua, perilaku masyarakat di Negara Jepang berubah. Kepercayaan itu luntur karena kekalahan

yang dialami oleh Negara Jepang. Banyaknya korban yang terlibat dalam perang dunia kedua tersebut baik yang terlibat maupun tidak. Hal tersebut lantas membuat masyarakat di Negara Jepang merasa dikorbankan oleh pemerintahannya sendiri.

Berakhirnya perang dunia kedua membuat banyak negara mengalami krisis akibat adanya perang skala besar itu, terutama dalam hal perekonomian. Sebelum terjadinya perang dunia kedua, Negara Jepang memiliki nilai *Gross Domestic Product* (GDP) yang relatif stabil, namun ketika perang dunia dua terjadi dan Negara Jepang menjadi salah satu yang kalah, tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negaranya. Negara Jepang merupakan salah satu dari negara yang ikut mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua. Setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua, keadaan internal Negara Jepang juga mengalami masalah. Salah satu masalah internal yang dialami oleh Negara Jepang diantaranya adalah masalah perekonomian Negara Jepang yang semakin memburuk setiap harinya dikarenakan banyaknya perusahaan ataupun industri yang berada di Negara Jepang mengalami kebangkrutan karena banyaknya para investor yang menarik investasinya.

Para investor menarik investasinya karena melihat keadaan ekonomi ataupun politik di Negara Jepang yang semakin memburuk dan tidak terkendali. Keadaan infrastruktur di Negara Jepang juga sangat buruk dan tidak beraturan, adanya bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat di Negara Jepang yang diakibatkan rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian dalam negaranya. Selain itu bencana yang disebabkan dari polusi kimia nuklir hingga

saat ini masih dirasakan oleh masyarakat di Negara Jepang. Beberapa hal tersebut membuat Negara Jepang mengalami keterpurukan dalam beberapa tahun setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua.

Negara Jepang mencoba bangkit dengan sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan negaranya, salah satunya adalah dengan memperbaiki perekonomiannya dengan orientasi kebijakan ekonomi yang baru. Kebangkitan Negara Jepang tentunya tidak begitu saja terjadi, melainkan ada faktor-faktor yang mendorong negara tersebut bangkit dari keterpurukan. Faktor internal yang mendorong Negara Jepang untuk bangkit dari keterpurukan adalah adanya karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Jepang, yang mana Negara Jepang merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional negaranya. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong Negara Jepang untuk bangkit dari keterpurukan adalah adanya pendudukan Negara Amerika Serikat di Negara Jepang dan munculnya perang Korea yang menguntungkan bagi Negara Jepang.<sup>3</sup>

Negara Amerika Serikat menduduki Negara Jepang pada tahun 1945 hingga 1952. Banyak kebijakan yang diterapkan oleh Negara Amerika Serikat pada Negara Jepang di mana Negara Amerika Serikat memanfaatkan kesempatan peluang untuk memperluas *hagemoni* negaranya. Kebijakan yang diterapkan Amerika Serikat pada saat pendudukannya di Negara Jepang antara lain adalah menghancurkan militer yang menjadi penyebab perang, mengadili penjahat-penjahat perang, membersihkan para pemimpin yang terbukti bertanggung jawab atas politik agresi, pembayaran ganti rugi perang, penghancuran industri perang

---

<sup>3</sup> Prasetyo et al., "Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan Amerika Serikat Tahun 1952-1964", <http://repository.unej.ac.id>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 04.30 WIB

dan perampasan alat-alat perang, pendemokrasian politik, ekonomi, dan pendidikan. Adanya kebijakan tersebut tentunya lebih menguntungkan Amerika Serikat dan malah memperburuk keadaan Negara Jepang dan membuat keadaan Negara Jepang semakin *chaos*. Namun kebijakan yang diterapkan Negara Amerika Serikat tidak berlangsung lama, karena adanya Perang Korea yang membuat Negara Jepang mampu merebut kekuasaan dari Negara Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Perang Korea membuat proses pengembalian kedaulatan Negara Jepang dari Negara Amerika Serikat menjadi cepat. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya perjanjian damai *San Fransisco* pada 8 September tahun 1951. Dengan adanya perjanjian damai *San Fransisco* tersebut, menandakan bahwa Negara Jepang secara resmi mendapatkan kedaulatan sebagai negara.<sup>5</sup> Isi dari perjanjian *San Fransisco* tersebut sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Isi Perjanjian *San Fransisco***

<b>No</b>	<b>Isi Perjanjian <i>San Fransisco</i></b>
1	Kepulauan di Negara Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat;
2	Daerah hasil ekspansi Negara Jepang dikembalikan, Kepulauan Kurilen dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia, Mansyuria, dan Taiwan kepada Cina, Kepulauan di Negara Jepang di Pasifik kepada Amerika Serikat. Korea dibagi menjadi dua, yaitu di bagian utara diduduki Rusia dan di sebelah selatan oleh Amerika Serikat;
3	Penjahat yang terlibat perang harus dihukum;
4	Negara Jepang harus membayar kerugian atas perang. <sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dunia Pendidikan, "Isi Perjanjian Postdam dan San Fransisco", <http://www.duniapendidikan.net>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 09.00 WIB

Adanya perjanjian tersebut membuat Negara Jepang sadar dan bangkit, terutama dalam hal perekonomiannya. Dalam masalah ekonomi, ada tiga aspek penting yang diperbaharui oleh Negara Jepang. Ketiga aspek itu adalah pembubaran *zaibatsu*, reformasi pertanian, dan reformasi tenaga kerja. Ketiga aspek tersebut tentunya tidak lepas dari pengawasan *Supreme Commander of the Allied Powers* (SCAP). SCAP sendiri dibentuk sebagai bentuk kekuasaan tertinggi di Negara Jepang yang mana hal tersebut disetujui oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry Truman untuk mengatur dan mengawasi jalannya Pemerintahan di Negara Jepang pada masa itu.

Pemerintah Jepang pada saat itu hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat melalui SCAP tersebut. Adapun berikut kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki pemerintahan pendudukan atau SCAP :

1. Kekuasaan kaisar dan Pemerintah Negara Jepang untuk memerintah negaranya berada di bawah kekuasaan SCAP;
2. Pengendalian dan Pengaturan Negara Jepang akan dilakukan melalui Pemerintah Negara Jepang sampai menghasilkan hasil yang memuaskan;
3. Maksud dan tujuan dari adanya Deklarasi Postdam akan dilaksanakan secara penuh. Pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, merupakan bagian dari kebijakan untuk menjaga hubungan Negara Jepang dengan negara lain dan menjaga perdamaian serta keamanan di Timur Jauh.<sup>7</sup>

Penjelasan ketiga aspek perubahan untuk sektor ekonomi di atas adalah sebagai berikut: Pertama yaitu pembubaran *zaibatsu*, *zaibatsu* berasal dari kata

---

<sup>7</sup> Dani Setiawan, Skripsi Strata I: "Kebijakan Ekonomi di Jepang Pada Masa Pendudukan Sekutu (1945-1952)" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 11.

'*zai*' yang berarti uang atau kekayaan, dan '*batsu*' yang berarti klan. Singkatnya, *zaibatsu* bisa diartikan sebagai klan kaya. Sejak masa Kekaisaran Meiji, *zaibatsu* merupakan istilah Negara Jepang untuk konglomerasi industri dan bisnis keuangan.<sup>8</sup> Jadi, *zaibatsu* merupakan grup bisnis keluarga yang terdiri dari perusahaan induk yang mana perusahaan itu membawahi anak perusahaan lainnya.<sup>9</sup> Peran *zaibatsu* dalam perekonomian di Negara Jepang bukanlah sedikit, melainkan *zaibatsu* dianggap sebagai salah satu penopang ekonomi Negara Jepang pada saat itu. Di bawah pendudukan Negara Amerika Serikat setelah menyerahnya Negara Jepang, upaya itu sebagian berhasil dibuat untuk membubarkan *zaibatsu*. Namun pada perjalanannya pembubaran *zaibatsu* tersebut diubah oleh Negara Amerika Serikat, karena Negara Amerika Serikat menganggap bahwa dengan adanya *zaibatsu* ternyata malah menguntungkan bagi Negara Amerika Serikat itu sendiri.<sup>10</sup>

Aspek selanjutnya yaitu reformasi pertanian, yaitu *land reform*. Adanya kebijakan *land reform* ini disebabkan oleh banyaknya petani penggarap di Negara Jepang yang menyewa tanah untuk bercocok tanam dengan biaya sewa lahan yang cukup tinggi, sehingga pendapatan para petani penggarap ini semakin kecil. Pemerintah pendudukan menginstruksikan kepada Pemerintah Jepang untuk mereformasi pertaniannya karena dianggap tidak efisien pada tahun 1947. Kebijakan tersebut memiliki dua maksud dan tujuan, yaitu memindahkan kepemilikan tanah kepada petani penggarap yang melakukan kegiatan bercocok

---

<sup>8</sup> Giras Pasopati, "Mengenal Zaibatsu, Klan Kaya di Negeri Sakura", <http://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 04.04 WIB

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Buku Belajar Zaibatsu, "Zaibatsu", <http://zaibatsu.karya-ilmiah.web.id>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 05.12 WIB



tanam dan memperbaiki praktik sewa menyewa atas tanah pertanian bagi orang yang melangsungkan hidupnya sebagai para petani penggarap yang menjadi penyewa tanah.<sup>11</sup>

Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Pemerintah Jepang mengajukan rancangan undang-undang untuk membatasi kepemilikan tanah para tuan tanah sampai dengan 5 *cho* dari seluruh luas lahan pertanian yang dimiliki dan sisanya dijual kepada penggarap lahan yaitu petani penggarap. Namun, rancangan undang-undang tersebut ditolak oleh pemerintah pendudukan (SCAP). Dalam kebijakan *land reform*, jumlah tanah yang boleh dimiliki oleh para petani dan tuan tanah yang tidak bermata pencaharian sebagai petani dibatasi hingga 1 *cho*. Dalam kebijakan itu juga disebutkan bahwa tuan tanah yang tinggal di daerah setempat diizinkan memiliki tanah hanya sebesar 1 *cho*, untuk yang tidak tinggal di daerah setempat tidak diperbolehkan memiliki lahan pertanian. Sedangkan lahan yang dapat disewakan oleh petani sekaligus pemilik tanah untuk petani penggarap dibatasi sampai 3 *cho*.<sup>12</sup>

*Cho* adalah ukuran yang biasa digunakan di Negara Jepang untuk satuan tanah. Untuk 1 *cho* setara dengan 9917.3557 meter persegi.<sup>13</sup> Jika lahan tersebut masih bersisa, lahan tersebut harus dijual dengan harga yang murah. Pemberian kredit dengan bunga yang rendah untuk membeli tanah juga di berikan oleh Pemerintah Jepang.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Go Web Tool, "Satuan- Cho", <http://www.gowebtool.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 05.30 WIB

Ketiga adalah reformasi tenaga kerja yang biasa disebut dengan *labor reform*. Masalah ketenagakerjaan di setiap negara tentunya tidak akan lepas dari masalah gaji yang rendah, kesejahteraan dalam bekerja dan diskriminasi wanita dalam pekerjaan. Dalam kebijakan *labor reform* merupakan sebuah kebijakan yang berisi berbagai undang-undang yang menurut pemerinatahan pendudukan (SCAP) dapat mensejahterakan para pekerja di Negara Jepang diantaranya yaitu peraturan mengenai pembatasan jam kerja.

Negara Jepang mulai melakukan perubahan ekonominya dengan ketiga aspek tersebut. Pola perubahan Negara Jepang tentunya dapat dikatakan cepat, mengingat negara lain yang terkena dampak krisis perang dunia kedua belum dapat membangkitkan ekonominya kembali seperti Negara Jepang. Tetapi, dengan adanya pendudukan Amerika Serikat di Negara Jepang tidak membuat langkah Negara Jepang mudah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena selama masa pendudukan Amerika Serikat di Negara Jepang, kondisi Negara Jepang masih mengalami inflasi dan depresi. Pada tahun 1950-an Negara Jepang sudah mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal perekonomiannya. Hal tersebut membawa Negara Jepang menjadi peringkat ketiga di dunia, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkembang pesat dibanding negara lain yang kalah dalam perang dunia kedua. Perkembangan ekonomi yang dapat dikatakan cukup pesat itu tentunya dilatarbelakangi oleh adanya suatu perubahan kebijakan politik luar negeri Negara Jepang yang dikenal dengan *Yoshida Doctrine*.

Selain itu, perekonomian Negara Jepang tentu saja didukung oleh banyak sektor termasuk berbagai industri yang berada di Negara Jepang. Mengingat bahwa salah satu penyumbang dana terbesar dalam perekonomian di Negara Jepang adalah dari sektor industri.<sup>14</sup> Pemerintah Jepang selalu mendukung perubahan dalam kemajuan teknologi demi menunjang segala bentuk perekonomian. Negara Jepang memberlakukan kebijakan proteksi terhadap produk-produknya akan tetapi lebih mengutamakan nilai ekspor.<sup>15</sup>

#### **B. *Yoshida Doctrine* dan Perkembangan Industri Jepang**

Titik perkembangan perekonomian Negara Jepang berkembang pesat *pasca* perang dunia kedua adalah ketika adanya suatu perubahan kebijakan orientasi dalam politik luar negerinya Negara Jepang *pasca* perang dunia kedua lebih ke arah memperbaiki sektor ekonomi dibandingkan dengan sektor militer dan keamanan. Perubahan kebijakan politik luar negeri Negara Jepang itu tentunya mempengaruhi bagaimana Negara Jepang saat ini. Berbicara masalah ekonomi tentunya tidak lepas dari masalah industri. Industri di Jepang tentunya sangat berkaitan dengan berkembangnya ekonomi yang cukup pesat di Negara Jepang. Perubahan orientasi kebijakan yang lebih memilih untuk merehabilitasi ekonomi dibandingkan dengan isu keamanan dan militer membuat Negara Jepang menjadi negara yang lebih fokus dalam sektor ekonomi.

---

<sup>14</sup> Kedutaan besar Jepang di Indonesia, "Ekonomi dan Industri", diakses dari [www.id.emb-japan.go.jp](http://www.id.emb-japan.go.jp), pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 18.20 WIB

<sup>15</sup> Moch.Arief Setiawan, "Kebangkitan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia II", <http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 19.00

Perubahan orientasi kebijakan itu dimulai pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yoshida Sigeru yaitu pada tahun 1946-1947 dan 1948-1954. Perdana Menteri Yoshida Sigeru membuat suatu kebijakan diplomasi dalam sektor ekonomi yang disebut dengan *Yoshida doctrine*. Perdana Menteri Yoshida merupakan Perdana Menteri Negara Jepang yang pertama *pasca* perang dunia kedua. *Yoshida doctrine* sendiri dianggap sebagai titik awal perkembangan ekonomi Jepang *pasca* perang dunia kedua hingga Jepang mencapai keajaiban ekonomi atau yang dikenal dengan *Japan economic miracle*.

Perkembangan pesat perekonomian Negara Jepang tentunya tidak didampingi dengan keamanan dan militer yang kuat. Keamanan dan militer Negara Jepang masih berada di bawah pengaruh Negara Amerika Serikat. Namun, hal tersebut yang membuat Negara Jepang semakin berfokus pada sektor ekonominya, hingga membuahkan hasil. Perekonomian Jepang dapat bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu memiliki perekonomian yang bagus. Sebagai bentuk sebuah kebijakan negara, *Yoshida Doctrine* ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Negara Jepang dengan tetap mempertahankan sistem pertahanan dan keamanan sesuai dengan undang-undang pasal 9 di Negara Jepang.<sup>16</sup>

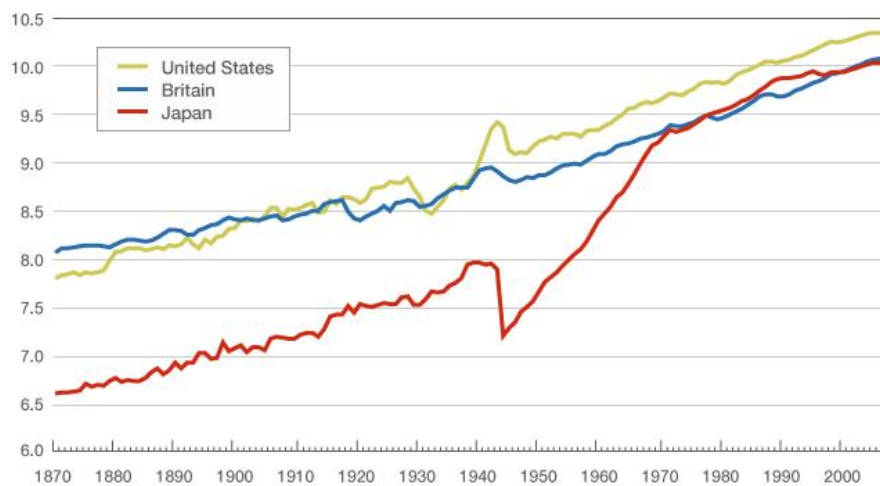
Dengan adanya dorongan dari adanya diplomasi ekonomi dari *Yoshida Doctrine* yang semakin kuat, tentunya membuat Negara Jepang semakin fokus untuk membuat ekonominya bangkit. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya industri yang berkembang di Negara Jepang. Pada tahun 1945-an terjadi krisis ekonomi yang besar di Negara tersebut hingga kemudian Negara Jepang

---

<sup>16</sup> Melati Patria Indrayani, Thesis Strata II, “Analisis Koizumi Doctrine dalam konteks persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN = The Koizumi Doctrine analysis of Japan China rivalry in Association of Southeast Asia Nation” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 20.

dapat menstabilkan ekonominya kembali sebelum tahun 1950. Tentunya kenaikan itu didukung oleh banyak bidang termasuk banyaknya industri yang berkembang saat itu.

**Gambar 2.1**  
**Perkembangan GDP Negara Jepang Sebelum dan Sesudah Perang Dunia Kedua**



Dari data grafik perkembangan GDP Negara Jepang sebelum dan sesudah perang dunia kedua di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat Negara Jepang mengalami kekalahan di *pasca* perang dunia dua pada tahun 1945, Negara Jepang mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami Negara Jepang tentunya membuat perekonomian negara tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun tersebut. Dalam grafik tersebut perekonomian Negara Jepang jauh tertinggal dari Amerika dan Inggris. Angka GDP Negara Jepang dalam grafik di atas pada tahun 1945 mencapai 7,2 dibandingkan dengan perekonomian Negara Amerika dan Inggris yaitu sebesar 9,1 dan 8,8. Namun pasca diberlakukannya perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri yang berupa *Yoshida Doctrine*, perkembangan perekonomian Negara Jepang semakin

berkembang baik terutama setelah tahun 1945, hingga pada tahun 1970-an mulai menyamakan GDP Negara Inggris bahkan melampaui angka GDP Negara Inggris pada sekitar tahun 1980-an.<sup>17</sup>

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan baku mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>18</sup> Industri dapat berkembang dengan baik jika memiliki faktor-faktor yang menunjang perkembangan industri tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor utama dan faktor penunjang.<sup>19</sup>

Faktor utama perkembangan industri adalah adanya modal, tenaga kerja, bahan baku, transportasi, sumber energi, dan marketing. Sedangkan faktor pendukung perkembangan industri adalah kebudayaan masyarakat, teknologi, pemerintah, dukungan masyarakat, kondisi alam, dan kondisi perekonomian. Kedua faktor tersebut harus saling berkaitan untuk mencapai industri yang maju. Industri di setiap negara tentunya mempengaruhi sektor perekonomian di negaranya, termasuk juga Negara Jepang. Industri di Negara Jepang dapat berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Hingga Negara Jepang dikenal dengan negara industri dan dapat bersaing dengan negara-negara yang memiliki

---

<sup>17</sup> Okazaki Tetsuji, "*Lessons from the Japanese Miracle: Building the Foundations for a New Growth Paradigm*", <http://www.nippon.com/en/in-depth/a04003/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 12.13 WIB

<sup>18</sup> Ilmu Pengetahuan, "Pengertian, definisi, macam, jenis dan penggolongan industri di Indonesia-Perekonomian Bisnis", <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia-perekonomian-bisnis.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 23.12 WIB

<sup>19</sup> Ilmu Pengetahuan, "Faktor Pendukung dan Penghambat Industri Bisnis - Perkembangan dan Pembangunan Industry - Ilmu Sosial Ekonomi Pembangunan" <http://www.organisasi.org/1970/01/faktor-pendukung-dan-penghambat-industri-bisnis-perkembangan-dan-pembangunan-industry-ilmu-sosial-ekonomi-pembangunan.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 16.23 WIB

industri maju sebelumnya.<sup>20</sup> Walaupun pada awal setelah berakhirnya perang dunia kedua Negara Jepang masih sangat dikuasai oleh Amerika, hal tersebut lantas tidak membuat Negara Jepang menjadi negara yang pasif dalam menciptakan terobosan-terobosan untuk mensejahterakan ekonomi negaranya.

Pada tahun 1950-an, Negara Jepang mengalami masa di mana perekonomiannya sangat berkembang pesat. Lebih dari sepuluh tahun setelah itu, rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 10 persen. Dengan kenaikan 10 persen itu, Negara Jepang menjadi satu-satunya negara yang mencapai rekor angka tersebut.<sup>21</sup> Perekonomian Negara Jepang tidak lepas dari masyarakatnya yang memiliki tingkat konsumerisme yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan teknologi dari masa ke masa yang semakin cepat dan canggih. Budaya konsumerisme sendiri menekan sektor industri-industri Negara Jepang untuk lebih banyak dan cepat memproduksi peralatan rumah tangga ataupun lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan masyarakat di Negara Jepang baik di kota-kota besar maupun di desa. Kebutuhan masyarakat seperti TV, kulkas, stereo, mesin cuci, AC, bahkan yang lainnya membuat industri-industri semakin bersaing keras untuk memenuhi kriteria dari banyaknya permintaan yang ada.

Kemajuan ekonomi di Negara Jepang saat itu disebut dengan *Japan economic miracle*. Pada awalnya Negara Jepang merupakan negara yang sering sekali menerima bantuan oleh Amerika, namun kini Negara Jepang dapat membuktikan bahwa Negara Jepang dapat menjadi negara pendonor di dunia. Pada jangka

---

<sup>20</sup> Eman Suherman, "Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo Hingga Pasca Perang Dunia II", <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=2955&val=297>, diakses pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 19.13 WIB

<sup>21</sup> *Ibid.*

waktu tertentu bahkan Negara Jepang menjadi negara pendonor terbesar di dunia pada tahun 1989, 1990, hingga 2001.<sup>22</sup> *Economy miracle* tersebut merupakan masa dimana Negara Jepang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi contoh negara-negara lain yang ingin memiliki perekonomian seperti Negara Jepang. *Economy miracle* yang didapat Negara Jepang seringkali dihubungkan dengan bantuan yang diberikan oleh pihak di Negara Amerika Serikat kepada Pemerintah Jepang.

Namun, pada akhir tahun 1980-an, perekonomian Negara Jepang yang dijuluki dengan *Japan economic miracle* tersebut mengalami penurunan. Pada akhir 1980-an, angka *Gross Domestic Product* (GDP) Negara Jepang turun yang awal mulanya kenaikan mencapai rata-rata 10 persen kemudian hanya menjadi 3 persen. Hal tersebut sontak membuat Negara Jepang yang mendapat *economy miracle* dengan adanya kejadian tersebut menandakan Negara Jepang telah mengalami fase *bubble economy*. *Bubble economy* yang dialami Negara Jepang ditandai dengan adanya inflasi yang menimpa Negara Jepang terus menerus yang semakin tidak terkendali terutama di sektor perumahan dan saham atas rendahnya suku bunga yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang sendiri.

Pada awalnya harga saham dan *real estate* mengalami kenaikan yang cepat yaitu dari tahun 1980 dan berpuncak pada tahun 1989. Pasar saham Negara Jepang naik dari 373 persen kemudian turun 50 persen dalam tiga tahun kedepan. Harga tanah mengikuti pola yang sama, naik hampir tiga kali lipat dalam paruh kedua tahun 1980-an, dan pada tahun 1990 mengalami puncak kenaikan, nilai

---

<sup>22</sup> Ricky Raymon, Skripsi Strata I: “Peran Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Memperkuat Hubungan-Ekonomi Asimetris Dengan Indonesia Studi Kasus: Oda (Official Development Assistance) Jepang Di Indonesia Pasca Krisis Asia (1999-2008)” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 3.



pasar seluruh tanah di Negara Jepang empat kali tanah di Negara Amerika Serikat. Tahun 1993, harga tanah di Negara Jepang mulai turun hampir 50 persen. Dalam buku dengan penulis Christopher Wood yang berjudul *The Bubble Economy: Japan's Extraordinary Speculative Boom of the '80s and the Dramatic Burst of the '90s* yang diterbitkan tahun 2005, efek pecahnya gelembung tersebut bisa dikatakan hampir abadi dikarenakan memperlambat laju pertumbuhan perekonomian Negara Jepang hingga saat ini.<sup>23</sup>

Dengan adanya *bubble economy* yang menimpa Negara Jepang justru membuat industri di Negara Jepang menjadi bangkit kembali. Banyaknya industri di Negara Jepang hingga saat ini membuktikan bahwa Negara Jepang telah sukses melewati masa-masa sulit walaupun tidak dengan kenaikan yang drastis di setiap tahunnya. Pemerintah Jepang menjalankan industrinya bukan dengan begitu saja, melainkan dengan diatur, direncanakan, dan dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri atau *Ministry of International Trade and Industry* (MITI) dan memiliki kebijakan industri. Kebijakan industri sendiri merupakan segala interaksi yang melibatkan pemerintah dengan sektor industri, termasuk juga perdagangan, *labor market*, sistem inovasi dan kebijakan kompetisi yang dilaksanakan dalam "*administrative guidance*".<sup>24</sup> Dengan adanya kebijakan industri yang ada saat itu, membuat industri-industri di Negara Jepang tetap bangkit hingga saat ini.

---

<sup>23</sup> Ekonomi Emas, "Fenomena Economic Bubble dan Decoupling (1)", <http://ekonomiemas.hol.es/content/fenomena-economic-bubble-dan-decoupling-1>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 21.08 WIB

<sup>24</sup> *Ibid.*

Banyak sekali tipe industri di Negara Jepang, salah satunya adalah industri yang bergerak dalam bidang manufaktur. Tercatat bahwa, 87 persen investasi di Negara Jepang sejak tahun 2010 direalisasikan ke dalam industri manufaktur. Banyak sekali permintaan dalam industri maufaktur antara lain mulai dari transportasi, logam, mesin dan elektronik, kimia dan famasi dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Industri manufaktur di Negara Jepang lebih banyak bergantung dari impor bahan bakar mentah dan bahan bakar minyak sebagai bahan untuk produksinya mengingat Negara Jepang sangat minim sumber daya alam.

Industri manufaktur di Jepang dapat dibilang merata, karena berbagai industri berdiri di beberapa perfektur utama Jepang. Pada Wilayah Kantō, kawasan industri berada di Wilayah Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo. Di Wilayah Tōkai, kawasan industri Chukyo-Tokai berada di Aichi, Gifu, Mie, dan Shizuoka. Di Wilayah Kansai, kawasan industri Hanshin berada di Osaka, Kyoto, dan Kobe. Kawasan industri Setouchi mencakup barat daya Pulau Honshu dan bagian utara Shikoku sekitar Laut Pedalaman Seto, sementara di Kyushu, kawasan industri berada di bagian utara Kyushu. Tentunya dengan persebaran industri di berbagai perfektur Jepang, membuat Jepang semakin gigih untuk selalu meningkatkan dan menawarkan teknologi yang lebih canggih dan modern dari masa ke masa.

Selain industri manufaktur Negara Jepang juga mendapatkan sumbangan GDP dari industri *anime*. *Anime* atau animasi sendiri sangat mudah di terima oleh berbagai masyarakat dunia. Hal tersebut tentunya membuat Negara Jepang memperoleh keuntungan yang tidak sedikit untuk GDP Negeranya. Hal itu yang

---

<sup>25</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “87% Investasi Jepang ke Industri Manufaktur”, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14146/87-Investasi-Jepang-ke-Industri-Manufaktur>, diakses pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 12.50 WIB

semakin membuat Negara Jepang lekat dengan sebutan Negara Industri yang besar setelah Amerika Serikat. Hingga pada tahun 2012, tercatat bahwa sektor industri di Negara Jepang menyumbang dana terhadap GDP Negara Jepang sebesar 27,5 persen.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perekonomian Negara Jepang mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dicermati di mana Negara Jepang mengalami kegagalan dalam perang dunia kedua yang akhirnya membawa negaranya ke dalam krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu membuat Negara Jepang sangat terpuruk hingga mencapai level yang sangat rendah pada tahun 1945. Namun ketika, diterapkannya perubahan orientasi kebijakan politik luar negeri Negara Jepang diterapkan yaitu yang berupa Yoshida Doctrine dan diarahkan pada rehabilitasi ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Negara Jepang sedikit demi sedikit membawa Negara Jepang mengalami perubahan ekonomi yang sangat baik hingga pada tahun 1980-an GDP Negara Jepang menyamai Inggris bahkan melampaui GDPnya pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Negara Jepang ini tentunya tidak lepas dari berbagai bidang termasuk salah satunya adalah bidang Industri manufaktur, di mana dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang akan dibahas pada bab berikutnya.

---

<sup>26</sup> Ew World Economy Team, "Japan Industry Sectors", [http://www.economywatch.com/world\\_economy/japan/industry-sector-industries.html](http://www.economywatch.com/world_economy/japan/industry-sector-industries.html), diakses pada tanggal 18 Februari 2017 22.10 WIB